

# DISPARITAS INSTITUSI SOSIAL MASYARAKAT TANI HULU DAN HILIR DASAR MUSI DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN DAN AIR

Edwin Martin<sup>1)</sup>, Efendi Agus Waluyo<sup>2)</sup>, Nur Arifatul Ulya<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang

Email: [abinuha1976@yahoo.co.id](mailto:abinuha1976@yahoo.co.id)

<sup>2)</sup>Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang

Email: [eawaluyo@gmail.com](mailto:eawaluyo@gmail.com)

<sup>3)</sup>Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang

Email: [nurarifatululya@gmail.com](mailto:nurarifatululya@gmail.com)

## Abstract

Forests and water are common property resources that often experience tragedy of the common. National policies and programs for damage control of watershed tend to be uniform across and within a watershed. In terms of the site situation, the Musi Watershed landscape in South Sumatra was showing different performance between the regions. Downstream areas have almost no primary natural forests, but upstream there are sporadic forests and not far from the agricultural areas of the community. Therefore, the implementation of national policies and programs requires a location-specific approach, based on an understanding of the interaction of local communities and their environment. This paper aims to explain the differences between social institutions of farming communities in the upstream and downstream of Musi watersheds in the use of forests and water. This comparative study attempts to compare the results of [1] research on Semende's cultural capital in Muara Enim district (upstream) with cultural studies of peoples around the peatlands in OKI (downstream) districts. The study used modern ethnographic approach, through in-depth interview method and participant observation in some villages in OKI District. The results show that there are differences in the worldview of upstream and downstream village communities on forests and water. In addition, the downstream community has more livelihood options, is more adaptive and responsive to technological and market changes, and focuses on financial capital. This disparity implies differences in the existence of social institutions in interacting with forest and water resources. We recommend a different approach in upstream and downstream river basin management. Forest and water resources in the downstream area require the introduction of new social institutions, while upstream needs the strengthening of existing social institutions.

**Keywords:** Common Pool Resources, Social Institutions, Rational Choice, Upland, Peatland

## PENDAHULUAN

Hutan dan air (sungai, danau) dipertimbangkan sebagai sumberdaya milik umum (Common Pool Resources/CPRs) atas dasar sifat kolektif dan sumberdaya dalam pengelolaannya. [2] mendefinisikan CPRs sebagai sistem sumberdaya alam atau buatan yang cukup besar sehingga menjadi biaya yang cukup untuk mengeluarkan para pemanfaat potensial dari penggunaannya. Karakteristik tersebut menjadikan banyak CPRs di seluruh dunia mengalami eksploitasi berlebihan dan degradasi [3]. Kerusakan CPRs akibat penggunaan sumberdaya terbatas secara berlebihan ini disebut [4] sebagai *The tragedy of the common*.

Namun demikian, banyak pakar menyanggah keberlakuan relasi linier CPRs dan *The tragedy of the common* [lihat 4–13].

Pemanfaat CPRs dapat menciptakan aksi bersama dan institusi yang mengatur interaksi masyarakat dengan sumberdaya. Institusi adalah sistem aturan sosial yang melekat dan terbangun sedemikian rupa sehingga menjadi kerangka interaksi sosial [15]. Menurut [16], pilihan struktur institusi dan hasil aksi bersama ditentukan oleh tiga faktor, berupa karakteristik fisik dan teknis sumberdaya, karakteristik kelompok pengguna, dan atribut institusi yang mengatur interaksi pengguna dan sumberdaya. Perbedaan tiga faktor tersebut akan menentukan kinerja institusi dan kelestarian sumberdaya. Perbedaan ini secara faktual terlihat dari perbedaan kelestarian CPRs (hutan dan air) antartempat yang berjauhan maupun berdekatan namun berbeda karakteristik institusi sosial lokalnya [lihat 16].



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
2. Dilarang menggunakan isi karya tulis ini untuk tujuan komersial apa pun.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah jenis CDRs khusus [18]. Sebagai wilayah yang dibatasi oleh kesatuan hidrologis yang terhubung, DAS memerlukan koordinasi pemanfaatan sumberdaya alam oleh semua penggunaannya. Keragaman dalam satu DAS adalah peniscayaan.

Kebijakan dan program nasional pengendalian kerusakan DAS cenderung seragam antar DAS dan dalam satu DAS. Dari sisi situasi tapak, lansekap DAS Musi di Sumatera Selatan ternyata menampilkan kinerja yang berbeda antarregion. Wilayah hilir hampir tidak memiliki lagi hutan alam primer, namun di hulu masih terdapat hutan secara sporadis dan tidak jauh dari areal pertanian masyarakat. Karenanya, implementasi kebijakan dan program nasional memerlukan pendekatan yang spesifik lokasi, berbasis pemahaman interaksi masyarakat lokal dan lingkungannya. Makalah ini bertujuan menjelaskan perbedaan institusi sosial masyarakat tani di hulu dan hilir DAS Musi dalam pemanfaatan hutan dan air.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencoba membandingkan hasil penelitian [1] tentang kapital budaya orang Semende di Kabupaten Muara Enim (wilayah hulu) dengan sudut pandang emik masyarakat tani di sekitar lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir/OKI (wilayah hulu) tentang institusi sosial mereka terkait hutan dan air. Penelitian menggunakan pendekatan etnografi modern, melalui metode wawancara mendalam dan participant observation di beberapa desa dalam Kabupaten OKI.

Penelitian dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2017. Kami bertanya dan berdiskusi dengan masyarakat lokal beberapa desa dalam kecamatan Pangkalan Lampan, Pampangan, Pedamaran, dan Pedamaran Timur tentang pemanfaatan hutan dan tubuh air dalam penghidupan mereka dulu dan sekarang. Kami merekam dan mencatat semua hasil wawancara dan observasi, kemudian menganalisisnya secara kualitatif untuk mendapatkan orientasi nilai budaya dan sistem penghidupan masyarakat. Analisis orientasi nilai budaya mengacu kepada kerangka konseptual Kluckhohn & Strobel sebagaimana juga digunakan oleh

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Orientasi Nilai Budaya

Orientasi nilai budaya masyarakat lokal petani di hulu dan hilir DAS Musi menunjukkan adanya perbedaan, terutama dalam konsep tentang aktivitas sehari-hari, waktu, relasi manusia-manusia, dan relasi manusia-alam (Tabel 1 dan 2). Orang hulu yang hidup di daerah berbukit dan bergunung kebanyakan memiliki cita-cita masa depan untuk menemukan ketenangan dalam hidup, sementara orang hilir yang hidup di sekitar rawa gambut lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan. Dari sisi konsep waktu, orang hilir lebih berorientasi masa depan dibandingkan masyarakat hulu yang selalu mengingat masa lalu. Dari sisi hubungan antarmanusia, petani di hulu sering membentuk konsensus sesama mereka, sementara petani di hilir melakukan hubungan secara hierarkis. Hidup yang harmoni dengan alam menjadi pegangan sebagian masyarakat hulu namun tidak menjadi pedoman orang hilir.

Tabel 1. Orientasi nilai budaya masyarakat hulu DAS Musi

Konsep	Orientasi nilai budaya		
Aktivitas	Aktivitas itu untuk nafkah hidup	Aktivitas itu untuk mencapai ketenangan dan stabilitas	
Waktu	Orientasi masa kini	Orientasi ke masa lalu	Orientasi masa depan
Relasi manusia-manusia	Orientasi kolateral - menghargai konsensus		Individualis-menghargai kerja nyata
Relasi manusia-alam		Harmoni dengan alam	Menguasai alam

Sumber : Diadaptasi dari [1,20]

Tabel 2. Orientasi nilai budaya masyarakat hilir DAS Musi

Konsep	Orientasi nilai budaya		
Aktivitas	Aktivitas itu untuk nafkah hidup	Aktivitas itu untuk mencapai kesejahteraan	
Waktu	Orientasi masa kini		Orientasi masa depan
Relasi manusia-manusia		Lineal-berjenjang	Individualis (in group)
Relasi manusia-alam			Menguasai alam

Sumber : Data primer 2016-2017, diolah



Orientasi nilai budaya adalah sebuah *worldview*, cara pandang prinsipil yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan orang per orang. Menurut [21], komponen utama bagi terciptanya praktik dan pengetahuan tradisional yang menghasilkan kelestarian secara ekologis adalah *a worldview* berupa etika lingkungan yang tepat. Kondisi alamiah berupa hutan yang masih tersisa di wilayah hulu DAS Musi dan kerusakan masif pada bentang alam di hilir adalah output dari *worldview* masyarakat sekitarnya.

### B. Karakteristik penghidupan

Potensi, batasan, dan tantangan bentang alam antara wilayah hulu dan hilir DAS Musi memengaruhi karakteristik penghidupan (*lifestyles*) masyarakatnya. Sumber penghidupan di wilayah hilir lebih beragam dan berkembang. Perbedaan keragaman sumber penghidupan ini tidak hanya terjadi saat sekarang saja, namun telah berlangsung lama. Dari sisi masyarakat lokal, penghidupan di hulu terkait erat dengan lahan (*land-based*). Bertani dan mengolah lahan adalah aktivitas penghidupan mereka sejak mula mendiami sebuah kareal di hulu. Sementara, masyarakat hilir pada dasarnya meletakkan penghidupan seputar air (*water-based*), namun kemudian menjadi lebih lekat dengan penghidupan yang bersumber dari permintaan pasar (*market-based*) yang didukung oleh kebijakan pemerintah.

Tabel 3. Karakteristik penghidupan petani hulu dan hilir

Atribut	Region DAS	
	Hulu	Hilir
Jenis mata pencaharian petani	Betani kopi, betani sawah, betani sayur, <i>beburu</i> burung dan rusa	Gesek kayu tenggelam, <i>begelam</i> , <i>bekarang</i> ikan, buruh HTI dan sawit, buruh proyek, pelihara walet, pelihara kerbau, <i>beburu</i> rusa, bekebun nanas, <i>upahan</i> di kebun nanas, <i>betani</i> sawit, <i>betani</i> karet, <i>betani</i> sawah, <i>bejual</i> kerupuk-kemplang
Respons terhadap teknologi, pasar, perubahan teknologi	Relatif lambat (konservatif)	Adaptif
Kapital finansial	Tersebar	Memusat
Relasi ekonomi	Egaliter	Patron-client

1. Sumber: Diadaptasi dari [1] dan data primer 2016-2017, diolah.

Perbedaan ini pada gilirannya menciptakan perbedaan struktur sosial dan relasi ekonomi. Masyarakat hulu memiliki atribut egaliterian yang terbiasa hidup dalam gotong royong dan tolong menolong. Sementara, masyarakat hilir berjuang untuk mendapatkan penghidupan melalui hubungan ekonomi *patron-client*. Denyut kehidupan sedikit banyak diatur dan tergantung dengan individu-individu yang menguasai kapital; lahan, uang dan relasi sosial dengan pihak luar.

Proses-proses sosial yang terkait erat dengan penghidupan memengaruhi dan dipengaruhi oleh situasi ekologis dimana proses sosial tersebut berlangsung. Situasi tersebut disebut para pakar sebagai sistem sosial-ekologis, misalnya dijelaskan oleh [22–24]. Masyarakat hilir di sekitar lahan gambut memiliki kemampuan adaptasi lebih tinggi ketika terjadi perubahan kondisi ekologis; tidak terjadi eksodus pada saat terjadi kebakaran masif lahan gambut dan tidak melakukan migrasi untuk mendapatkan penghidupan lebih baik. Ini berlawanan dengan karakteristik masyarakat hulu, sebagaimana digambarkan oleh [1].

### C. Institusi sosial terkait hutan dan air

Disparitas orientasi nilai budaya dan karakteristik penghidupan masyarakat lokal di hulu dan hilir DAS Musi berdampak pada disparitas institusi sosial keduanya, kemudian berujung pada perbedaan kinerja lansekap. Pada masyarakat hulu dapat ditemukan institusi sosial seperti *lubuk larangan*, *ghimbe ulu ayek*, hutan *peramunan*. Institusi sosial inilah yang kemudian berperan menjaga hutan dan air dari ancaman perubahan, karena dilengkapi dengan sanksi sosial (misalnya, lihat [17]).



Gbr 1. Hutan ulu ayek di Semende, Muara Enim



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis, atau tujuan lainnya.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk mempromosikan kepentingan pribadi atau kelompok.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan lain yang melanggar hukum atau merugikan masyarakat.

Institusi sosial yang cukup terkenal di hilir adalah lelang lebak lebung, sebuah mekanisme sistem penguasaan legal terhadap sumberdaya perikanan di areal tertentu. Lelang lebak lebung mengadopsi tata kelakuan peradaban modern tentang siapa mendapatkan apa. Jika dulu peserta lelang dan penyelenggara lelang berada dalam satu pemerintahan marga, kini telah melibatkan institusi pemerintahan kabupaten. Lebak lebung dikuasai oleh pemenang lelang yang disebut *pengemin*. Pengemin memiliki relasi sosial hierarkis dengan nelayan yang *bekarang* (mencari ikan) dan pedagang atau penodan.

Institusi sosial di wilayah hulu terbentuk atas dasar kepentingan bersama untuk mempertahankan kemampuan subsistensi [23]. Mekanisme relasi sosial berperan lebih besar dalam merancang dan mempertahankan institusi tersebut. Sementara, institusi sosial di hilir tidak banyak mengatur tentang CPRs, karena lebih menyerahkan kepada mekanisme relasi ekonomi. Masyarakat hulu mengatur diri sendiri dan mengacu kepada pluralisme hukum, masyarakat hilir diatur oleh mekanisme hukum positif.



Gambar 2. Kebun nanas di lahan gambut OKI dengan penanda kepemilikan guna menghindari penyerobotan pihak lain

Perbedaan karakteristik institusi sosial serta nilai-nilai yang menyertainya terlihat dari respon terhadap kejadian bencana alam di hulu dan hilir DAS Musi. Di wilayah hulu, bencana longsor dianggap masyarakat sebagai masalah, namun hingga kini kejadian tersebut tetap berulang. Sementara di wilayah hilir, bencana kebakaran tahun 2015 tidak dianggap sebagai masalah berarti oleh masyarakat lokal, namun kejadiannya menimbulkan drastis dalam 2 (dua) tahun terakhir, terutama karena kepatuhan mereka terhadap *law enforcement* kebijakan tanpa bakar.

#### 4. KESIMPULAN

Masyarakat tani hulu dan hilir DAS Musi memiliki karakteristik institusi sosial yang berbeda dalam hal pemanfaatan hutan dan air. Perbedaan tersebut dapat dipahami melalui sudut pandang sistem sosial ekologis. Oleh karena itu, butuh pendekatan yang berbeda untuk mengendalikan DAS di hulu dan hilir. Sumberdaya hutan dan air di hilir membutuhkan introduksi institusi sosial baru, sementara di hulu perlu penguatan institusi sosial yang telah ada.

#### D. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang memungkinkan terselenggaranya penelitian ini. Dukungan pendanaan terutama dari JICA MISSION melalui Bapak Hiromitsu Kuno, Badan Restorasi Gambut, dan Kementerian LHK.

#### 5. REFERENSI

- [1] Martin, E., 2016. Kapital budaya petani dalam pelestarian hutan: Studi fenomenologis Orang Semende di dataran tinggi Sumatera Selatan, Institut Pertanian Bogor [Disertasi].
- [2] Ostrom, E., 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, New York. doi:10.2307/133271.
- [3] Cinner, J.E., Basurto, X., Fidelman, P., Kuange, J., Lahari, R., Mukminin, A., 2012. Institutional designs of customary fisheries management arrangements in Indonesia, Papua New Guinea, and Mexico, *Mar. Policy*. 36:278–285. doi:10.1016/j.marpol.2011.06.005.
- [4] Hardin, G., 1968. The tragedy of the commons, *Science* (80- ). 162: 1243–1248. doi:10.1080/19390450903037302.
- [5] Feeny, D., Berkes, F., McCay, B.J., Acheson, J.M., 1990. The Tragedy of the Commons: Twenty-two years later, *Hum. Ecol.* 18:1–19. doi:10.1007/BF00889070.
- [6] Araral, E., 2014. Ostrom, Hardin and the commons: A critical appreciation and a revisionist view, *Environ. Sci. Policy*. 36:11–23. doi:10.1016/j.envsci.2013.07.011.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau
  - c. Pengutipan ini dilakukan dengan cara yang benar
  - d. Pengutipan ini dilakukan dengan cara yang benar
- [7] Lambini, C.K., Nguyen, T.T., 2014. A comparative analysis of the effects of institutional property rights on forest livelihoods and forest conditions: Evidence from Ghana and Vietnam, *For. Policy Econ.* 38:178–190. doi:10.1016/j.forpol.2013.09.006.
- [8] Buufum, B., 2012. Why is There No Tragedy in These Commons? An Analysis of Forest User Groups and Forest Policy in Bhutan, *Sustainability*. 4:1448–1465. doi:10.3390/su4071448.
- [9] Baines, C. van Laerhoven, F., 2014. Making it last? Analysing the role of NGO interventions in the development of institutions for durable collective action in Indian community forestry, *Environ. Sci. Policy*. 1–14. doi:10.1016/j.envsci.2014.06.008.
- [10] Adams, W.M., 1999. Making sustainability happen, *Trends Ecol. Evol.* 14:119–120. doi:10.1016/S0169-5347(98)01566-3.
- [11] Quinn, C.H., Huby, M. Kiwasila, H. Lowett, J.C., 2007. Design principles and common pool resource management: An institutional approach to evaluating community management in semi-arid Tanzania, *J. Environ. Manage.* 84: 100–111. doi:10.1016/j.jenvman.2006.05.008.
- [12] Sakker, A. Itoh, T., 2001. Design principles in long-enduring institutions of Japanese irrigation common-pool resources, *Agric. Water Manag.* 48: 89–100. doi:10.1016/S0378-3774(00)00125-0.
- [13] Larner, C., 2016. By whose rules, for whose needs?, Swedish University of Agricultural Sciences [Master Thesis]
- [14] Andersson, K., 2013. Local Governance of Forests and the Role of External Organizations: Some Ties Matter More than Others, *World Dev.* 43: 226–237. doi:10.1016/j.worlddev.2012.09.001.
- [15] Longson, G.M., 2006. What are institutions?, *J. Econ. Issues*. XL: 1–25.
- [16] Ostrom, N., 1986 *Local Institution Development: An Analytical Sourcebook, Diverse Cases*, Kumarian Press, West Hartford, CN.
- [17] Martin, E., Suharjito, D., Darusman, D., Sunito, S. Winarno, B., 2016. Traditional Institution for Forest Conservation within Changing Community: Insight

from the Case of Upland South Sumatra, *Komunitas Int. J. Indones. Soc. Cult.* 8: 236–249.

doi:10.15294/KOMUNITAS.V8I2.5439.

- [18] Kerr, J., 2007. Watershed Management: Lessons from Common Property Theory, *Int. J. Commons*. 1: 89–109. <http://www.thecommons.org>.
- [19] Uddin, M.E., 2015. Exploration and Implication of Value Orientation Patterns in Social Policy-Practice with Ethnic Communities in Bangladesh, *Glob. Soc. Welf.* 2: 129–138. doi:10.1007/s40609-014-0018-5.
- [20] Martin, E., Suharjito, D., Darusman, D., Sunito, S., Winarno, B., 2016. Tunggu Tubang and Ulu Ayek: Social Mechanism of Sustainable Protected Forest Management, *JMHT*. 22: 85–93. doi:10.7226/jtfm.
- [21] Berkes, F., Colding, J., Folke, C., 2000. Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management, *Ecol. Adapt.* 10: 1251–1262. doi:10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2.
- [22] Folke, C., 2006. Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses, *Glob. Environ. Chang.* 16: 253–267. doi:10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002.
- [23] Persha, L., Agrawal, A., Chhatre, A., 2011. Social and Ecological Synergy: Local Rulemaking, Forest Livelihoods, and Biodiversity Conservation, *Science* 331: 1606–1608. doi:10.1126/science.1199343.
- [24] Walker, B., Holling, C.S. Carpenter, S.R., Kinzig, A., 2004. Resilience, adaptability and transformability in social-ecological systems, *Ecol. Soc.* 9
- [25] Martin, E., Suharjito, D., Darusman, D., Sunito, S. Winarno, B., 2016. Etika subsistensi petani kopi: Memahami dinamika pengembangan agroforestri di Dataran Tinggi Sumatera Selatan, *Sodality J. Sosiol. Pedesaan*. 4: 92–102.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.